



Media Title	Bisnis Indonesia		
Head Line	APBN Ditekan Seminimal Mungkin		
Date	16 Juni 2014	Color	
Section	News	Circulation	
Page No	30	Article Size	
Journalist	Anggara Pernando	Advalue	
Frequency	Daily	PR Value	

▶ TRANS-SUMATRA

APBN Ditekan Seminimal Mungkin

JAKARTA—Kementerian Perekonomian bersikap realistis dalam membangun jalan tol trans-Sumatra sepanjang 2.737 kilometer dengan memanfaatkan dana APBN seminimal mungkin.

▶ Terdapat beberapa opsi agar pembangunan dapat dimulai.

▶ Tingkat pengembalian investasi masih di bawah 10%.

Anggara Pernando
redaksi@bisnis.co.id

Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung mengatakan terdapat beberapa opsi agar pembangunan jalan tol senilai Rp360 triliun itu dapat dimulai.

Menurutnya, tim dari Kementerian BUMN, Kemenko Perekonomian, Kementerian PU, dan Sekretaris Kabinet akan membahas secara rinci dan detail tentang permasalahan yang dihadapi untuk meneruskan megaprojek itu dan segera melaporkan hasilnya ke instansinya.

"Pendekatannya bisa ruas per ruas," tutur Chairul kepada *Bisnis* setelah peninjauan Pasar Induk Cipinang dan gudang beras Bulog di Jakarta, Jumat (13/6).

Menurutnya, opsi yang sedang berkembang yakni penunjukan langsung salah satu BUMN yang khusus mendapatkan penugasan, juga bagian yang dibahas. Namun opsi ini tidak menjadi pilihan satu-satunya.

Dengan pendekatan pembangunan berdasarkan ruas jalan, maka bagian jalan yang paling mendekati kelayakan ekonomi dan bisnis akan lebih diprioritaskan pembangunannya. Dengan model ini penyertaan modal negara dapat ditekan seminimal mungkin. "Semangatnya adalah seminimal mungkin penggunaan APBN."

Atas dasar minimalisasi penggunaan anggaran negara ini, menurut Chairul, opsi menjadikan trans-Sumatra sebagai *high grade highway* juga tidak termasuk dalam pembahasan.

Pembangunan *high grade highway* akan membutuhkan investasi yang sangat besar dan harus ditanggung sepenuhnya oleh APBN dan APBD.

High grade highway merupakan konsep awal pembangunan jalan di Pulau Sumatra. Berdasarkan Masterplan for Arterial Roads in Sumatra (MARS), *high grade highway* Sumatra itu dirancang dengan kualitas jalan tol, tetapi tidak semua jalan itu berbayar.

Kajian tersebut dilakukan oleh Korea Selatan dengan konsep sinergi antara pembangunan jalan raya, rel kereta api, dan pengembangan pelabuhan laut.

Rel kereta api dan jalan akan dibangun sejajar untuk saling menunjang. *High grade highway* ini kemudian berubah rupa menjadi jalan tol trans-Sumatra yang menghubungkan Lampung hingga Aceh.

Adapun opsi penyertaan modal negara ke salah satu BUMN, kata Menko Perekonomian, juga dimungkinkan.

Menurutnya, pembangunan jalan tol ini akan membuat pemerataan pertumbuhan, dan dibutuhkan oleh Sumatra. Namun secara bisnis, tidak ada swasta yang berminat karena trafik kendaraan yang masih rendah.

Berdasarkan catatan *Bisnis*, tingkat pengembalian investasi atau IRR (*internal rate of return*) masih di bawah 10%. Sementara itu, IRR sebuah proyek yang layak adalah 16%. Bahkan dari beberapa ruas trans-Sumatra yang dilelang, tidak ada swasta yang berminat.

"Tidak seseram itu, kalau penyertaan modal negara, maka [belum tentu] angkanya [penyertaan modal negara] bisa sangat besar," tutur Chairul.

Asumsi selama ini, jika ruas tol ini

ditugaskan ke satu BUMN, maka setidaknya dibutuhkan sekitar Rp350 triliun untuk pembangunannya.

Artinya jika mengandalkan pinjaman dana pihak ketiga seperti bank, maka BUMN harus menyediakan dana mencapai Rp90 triliun-Rp100 triliun atau 30% dari biaya yang dibutuhkan.

Tentu jumlah sebesar ini sebuah angka yang fantastis dan tidak akan sanggup dibayai dengan penyertaan modal negara.

TIDAK MENGETAHUI

Semestinya pembangunan jalan tol yang akan membuka ruang pertumbuhan di Sumatra ini menjadi satu kesatuan suara pemerintah. Kementerian Keuangan yang menganggarkan Rp2 triliun dalam APBN-Perubahan 2014 ternyata tidak diketahui departemen teknis.

Kementerian Pekerjaan Umum yang memiliki kewenangan teknis mulai dari Dirjen Bina Marga, Wakil Menteri hingga Menteri Pekerjaan Umum mengaku tidak mengetahui keberadaan pos anggaran pembangunan tol yang membelah Sumatra ini.

"Silakan tanyakan ke Menteri Keuangan, saya tidak tahu ada pos trans-Sumatra," kata Menteri PU Djoko Kirmanto, Kamis (12/6).

Wakil Menteri PU Hermanto Dardak juga mengatakan ketidaktahuannya mengenai hal itu.

Dirjen Bina Marga Djoko Murjanto ketika ditemui *Bisnis* setelah rapat pembahasan RAPBN 2015 di gedung DPR pekan lalu pun mengatakan tidak mengetahui mata anggaran jalan tol trans-Sumatra itu.

Atas dasar belum adanya komunikasi ini, akhirnya dalam rapat Badan Anggaran DPR pada Jumat (13/6) malam, pos penyertaan modal negara ini dikolok dianggarkan dalam APBN-P 2014. Alasannya belum dibahas di tingkat komisi dengan kementerian teknis.

DPR menyarankan agar anggaran untuk pembangunan trans-Sumatra dimasukkan ke dalam APBN 2015. □

